

MULTIKULTURALISME SEBAGAI SEBUAH CARA HIDUP

**Oleh
YOSEPH ANDREAS GUAL**

Pengantar

Keragaman adalah sebuah kepastian yang terberi dalam hidup yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Seseorang tidak bisa memilih dari budaya mana ia berasal. Seseorang tidak bisa memilih atau menolak dilahirkan dari seorang ayah Jawa dan ibu Sumatera. Walau demikian ada beragam perbedaan hidup yang ditentukan oleh situasi dan pilihan-pilihan yang dibuat oleh seseorang. Ragam perbedaan yang ada ini menjadi sebuah tantangan saat ini ketika teknologi transportasi dan komunikasi informasi telah mampu mengatasi ruang dan waktu manusia dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Secara fisik, seseorang dengan mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan berinteraksi dengan manusia dengan ragam budaya yang berlainan. Seseorang bisa tinggal di mana saja dengan beragam alasan dengan sangat mudah dan bebas – meskipun sebagian orang masih “terkungkung” dengan kesulitan-kesulitan pribadi maupun sosial yang ia alami. Seorang Brazil dengan mudah berbicara dengan rekan bisnisnya, si Australia dengan telepon genggam sambil berkumpul dengan teman lain di Kanada. Dengan kemajuan teknologi semacam ini, keragaman budaya menjadi sebuah kewajaran yang tidak bisa dihindari. Keberagaman merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Semua orang dituntut untuk bisa menerima, menghormati dan hidup bersama dengan keberagaman dengan toleran agar bisa rukun. Kerukunan akan menghasilkan ketertiban. Kerukunan dan ketertiban yang dihasilkan dalam kebebasan yang bertanggung jawab menjadi syarat orang bertumbuh karena semua potensi yang dimilikinya dapat digali dan dimanfaatkan.

Sebagai sebuah bangsa, Indonesia juga dibangun atas kesadaran keragaman semacam di atas. Namun, hari-hari ini keragaman ke-Indonesiaan sedang mengalami rupa-rupa tantangan. Ada banyak kasus intoleransi terhadap keberagaman baik di bidang agama, sosial maupun politik. Politik identitas yang memecah belah ke-

Indonesia-an karena menggunakan isu identitas yang berbeda untuk menghasut dan merendahkan kelompok lain yang berbeda untuk meraih kesuksesan digunakan dan diperdengarkan dengan gaung yang sangat keras oleh sekelompok warga. Ada upaya untuk merongrong identitas ke-Indonesia-an dengan cara berupaya menggantikan dasar negara dengan dasar negara yang lain. Rupa-rupa aturan di lembaga negara dan perda-perda daerah yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi yang tujuannya lebih menekankan pada penegakan aturan lain selain perundang-undangan di Indonesia. Diskriminasi terhadap penganut agama lain di sekolah maupun dalam lembaga dan masyarakat cenderung terdengar di media dan media sosial. Semua ini merupakan gambaran bahwa keragaman Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ada masalah yang harus segera disadari, dipahami dan dicari solusinya secara bersama-sama. Semua orang perlu terlibat dalam mengembalikan kesadaran keragaman ke-Indonesia-an ini dengan cara dan kemampuan yang sesuai dengan bidang masing-masing orang.

Upaya untuk merawat ke-Indonesia-an seyogyanya harus dimulai dari kesadaran akan multikulturalisme yang dimiliki oleh bangsa ini. Bahwa perbedaan adalah sebuah potensi. Potensi untuk meraih keunggulan jika perbedaan-perbedaan itu dirawat dan dimanfaatkan secara maksimal untuk saling mengisi dalam pembangunan. Seperti sebuah taman yang menarik dan indah jika diisi oleh berbagai jenis dan ragam warna dan bentuk bunga yang ditata secara proposional dan pada tempatnya. Namun perbedaan itu juga memiliki potensi untuk merusak dan menghancurkan jika dilihat sebagai ancaman atas kehidupan yang lain lalu tidak dikelola dengan baik. Ke-Indonesia-an akan berkembang jauh ke depan dan lestari jika kesadaran dan upaya hidup bersama memanfaatkan keberagaman sebagai motor penggerak hidup bersama dengan cara toleransi, menghormati, memberi dukungan dan hidup bersama dengan rukun dan damai.

Dalam konteks semacam ini maka, tulisan-tulisan ini merupakan bagian dari upaya penulis untuk turut memberi sumbangan pemikiran berkaitan dengan keragaman hidup bersama. Empat tulisan ini merupakan tugas mata kuliah

Multikulturalisme yang dijadikan sebuah bundelan tugas. Penulis berupaya untuk mengubahnya menjadi sebuah tulisan utuh namun karena pertimbangan bahwa tulisan-tulisan ini sebaiknya dibiarkan dalam bentuk empat tulisan berbeda agar tujuannya dapat tercapai sehingga penulis dengan sengaja tidak mengubah format tulisannya. Tulisan-tulisan ini disusun dari urutan konsep hingga praktis.

Bab 1 berbicara tentang konsep liberalism, multikulturalisme dan toleransi. Konsep-konsep ini beririsan langsung dengan multikulturalisme sebagai sebuah pandangan hidup yang diterima oleh sebagian besar masyarakat dunia barat sejak awal abad ke duapuluh. Bab 2 berbicara tentang pentingnya pendidikan formal memasukan pendidikan multikulturalisme di dalam kurikulumnya. Multikulturalisme sebagai sebuah pandangan hidup perlu diberikan sejak dini oleh karena itu semua institusi pendidikan termasuk institusi pendidikan formal memiliki kewajiban mengajarkan peserta didik tentang multikulturalisme ditinjau dari sisi ilmiah maupun praksisnya. Bab 3 merupakan sebuah studi kasus tentang dampak intoleransi terhadap keberagaman yang berakhir pada konflik. Konflik pada keberagaman bisa ditimbulkan oleh adu domba berbagai pihak kepada masyarakat multikulturalisme. Namun demikian, masyarakat memiliki modal sosial untuk bisa kembali pulih. Bab 4 merupakan tanggapan penulis atas sebuah artikel berita politik yang menggunakan berbagai isu keberagaman untuk mendapatkan kekuasaan.

Akhirnya, tulisan-tulisan kiranya ini bisa menjawab persoalan yang diminta oleh dosen untuk melihat multikulturalisme dan berbagai persoalannya walaupun tidak sesuai format tulisan yang diminta. Penulis memohon maaf bila dari sisi penulisan maupun substansi tulisannya tidak berkenan. Penulis memohon kritikan dan masukan demi perbaikan ke depannya. Terima kasih untuk Profesor Waktu yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk mengikuti mata kuliah Multikulturalisme ini. Ada banyak wawasan baru yang penulis dapatkan dari mata kuliah ini. Sekali lagi terima kasih.

BAB I

LIBERALISME, MULTIKUTURALISME DAN TOLERANSI

A. Liberalisme

Liberalisme merupakan filosofi politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah, dan persamaan di depan hukum (Nando, 2020). Liberalisme berusaha menggantikan norma-norma hak istimewa turun-temurun, agama negara, monarki absolut, hak ilahi raja dan konservatisme tradisional dengan demokrasi perwakilan dan supremasi hukum. Bagi liberalisme tujuan negara sebagai asosiasi individu-individu yang independen adalah memfasilitasi proyek “kebahagiaan” anggota masyarakat karena itu negara tidak boleh memaksa proyeknya sendiri (Minogue, 2008). Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa individu yang mendahului masyarakat atau negara oleh karena itu, semua bentuk pemahaman politik harus menghormati hal mendasar ini dengan memberikan perasaan nyaman dan aman kepada individu untuk secara bebas mengejar tujuan pribadinya (Roland, 2000). Pandangan ini melihat bahwa dalam masyarakat plural tidak ada seorang pun yang memiliki hak istimewa, karena itu hukum yang dibuat oleh negara haruslah menjamin keadilan semua individu dalam meraih tujuan hidupnya.

Liberalisme berasumsi bahwa manusia sejak lahir memiliki hak-hak alamiah (bebas berkumpul, pendapat, ekspresi diri) sehingga siapapun tidak berhak menghalanginya (Suyudi, 2003). Masyarakat dan pemerintah wajib menjaga kebebasan individu. Selain hak alamiah ini, manusia sejak awal sudah dianugerahi akal budi yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan dan memahami serta mengatur lingkungannya secara baik dan adil. Karena semua manusia mendapatkan akal budi yang sama maka semua orang sederajat dan tidak boleh ada yang menindas satu dengan yang lain. Satu-satunya batasan atas kebebasan manusia terhadap kebebasan orang lain yakni moral yang tidak tertulis di mana seseorang tidak boleh menjalankan kebebasannya dengan melanggar kebebasan orang lain.

Pandangan dasar terhadap manusia semacam ini berpengaruh pada cara pandang kaum liberal kepada hidup bersama atau masyarakat. Menurut kaum liberal, masyarakat ada karena individu mau melepaskan sebagian kebebasannya kepada hidup bersama karena itu tujuan hidup bermasyarakat adalah untuk mencapai kesejahteraan individu. Masyarakat hanya menjadi wadah bagi kemajuan kepentingan anggotanya dengan menciptakan keamanan dan perlindungan yang baik. Cara pandang terhadap hidup bersama semacam ini pada akhirnya mempengaruhi cara pandang kaum liberal terhadap institusi negara. Kaum liberal menganggap negara sebagai alat untuk memajukan dan memaksimalkan terwujudnya kepentingan anggota masyarakat. Sebab sebelum negara ada manusia dengan akal budinya telah ada dalam keadaan sederajat sehingga tugas negara adalah menjaga kebebasan individu. Negara yang paling baik adalah negara yang paling sedikit mengatur warga negara dan jika negara tidak mampu mewujudkan hal tersebut oknum pemerintahan sebaiknya melepaskan jabatannya.

Kaum libertarian melihat hakekat kebenaran dan pengetahuan sebagai sesuatu yang dianugerahkan Tuhan melalui akal budi. Dasar kekuatan manusia terletak pada pemanfaatan akal budi guna mencari pengetahuan. Karena itu, kebenaran bagi kaum liberal berasal dari pikiran manusia yakni pengetahuan yang digali dari potensi akal budinya dan bukan dari kekuasaan. Karena semua orang memiliki akal budi maka individu tidak perlu diarahkan untuk menerima sebuah kebenaran tertentu. Kebenaran akan ditemukan manakala orang mau berdebat secara terbuka atau mau bermusyawarah dengan individu yang lain.

Dengan mencermati postulat dasar liberalisme tentang manusia, masyarakat, negara, pengetahuan dan kebenaran maka ada beberapa prinsip mendasar dari aliran filsafat liberalisme ini (Butler, 2019):

1. Praduga atas kebebasan

Kaum liberal mendukung kebebasan individual yang juga harus dipraktekkan dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi namun memiliki dasar yang berbeda tentang mengapa kebebasan tersebut penting dijunjung tinggi. *Kaum liberal klasik* melihat kebebasan baik untuk kebebasan itu sendiri karena secara psikologis

seseorang yang sehat pasti akan memilih kebebasan bukan keterikatan. *Kaum pembela hak alamiah* melihat kebebasan sebagai pemberian Tuhan atau alam karena itu tidak boleh direnggut. Ada yang berpendapat bahwa kebebasan merupakan kontrak sosial dalam upaya menghindari konflik dan kekacauan. Ada yang lihat kebebasan sebagai syarat untuk kemajuan. Dan bagi kaum humanis melihat bahwa kebebasan adalah bagian penting dari eksistensi kemanusiaan seseorang, jika kebebasan direnggut maka manusia menjadi budak dari orang lain.

2. Keutamaan individu

Kaum liberal lebih mementingkan kepentingan individu ketimbang kepentingan kolektif jika tidak ada alasan yang sangat mendasar. Mereka berargumen masyarakat tidak memiliki pemikiran sendiri hanya individulah yang berpikir, menilai, memilih dan mengendalikan keadaan. Bila individu tidak sependapat dengan individu yang lain, bukan berarti mewakili kepentingan kelompok melainkan kepentingan individu yang berkonflik. Berdasarkan pengalaman, ketika kebebasan individu dilepaskan sepenuhnya kepada kelompok, kelompok dapat memanfaatkan hak itu untuk menindas individu. Misalnya kekejaman Hitler, Pol Pot dan lainnya. Karena masyarakat sangat kompleks maka tidak ada otoritas yang lebih tahu dari individu akan apa yang dibutuhkan oleh individu itu sendiri.

3. Peminimalisasian pemaksaan

Kaum liberal ingin hidup bersama secara damai oleh karena itu mereka berupaya untuk meminimalisir pemaksaan dan ancaman. Untuk itu mereka memberikan hak penggunaan kekerasan kepada pemerintah dan otoritas kehakiman untuk menjaga kebebasan namun ketika otoritas ingin menggunakan kekuasaan dan kekerasan, mereka wajib mengemukakan alasan pembenaran yang jelas mengapa pengekangan dan kekerasan itu layak ditempuh.

4. Toleransi

Kaum liberal melihat toleransi dan saling menghormati sebagai landasan untuk terciptanya kerja sama yang damai dan terciptanya masyarakat yang saling menguntungkan dan berfungsi dengan baik. Perbedaan antara manusia adalah fakta dalam kehidupan sosial, dan akan selalu seperti itu. Liberalisme tidak percaya

bahwa perbedaan tersebut bisa dihilangkan dan sangat skeptis dengan usaha para utopis yang mencoba untuk melakukannya. Oleh karena itu, toleransi akan selalu menjadi bagian penting dalam fungsi kehidupan sosial.

5. Pemerintah perwakilan dan terbatas

Kaum liberal percaya bahwa demokrasi perwakilan (representatif) dan konstitusional adalah cara terbaik yang pernah ditemukan untuk menjaga agar para anggota legislator bisa akuntabel pada rakyatnya. Pemilihan umum bukan hanya sekedar tentang memilih pemimpin yang baik, tetapi menyingkirkan yang buruk. Dengan pemilih yang lebih siaga dan lebih mendapat informasi (berpengetahuan), maka para legislator bisa bekerja dengan baik. Walau demikian, demokrasi memiliki batasannya; dia bisa saja menjadi cara yang baik dalam membuat keputusan, tetapi hanya sedikit keputusan; biasanya lebih baik jika kita membiarkan individu membuat keputusan mereka sendiri.

6. Supremasi hukum

Prinsip mengekang kekuasaan dan menciptakan keamanan bagi publik adalah supremasi hukum (kekuasaan hukum). Ini adalah ide bahwa masyarakat harus diatur oleh hukum yang diketahui luas, bukannya oleh keputusan sepihak dari pejabat pemerintah. Hukum sama untuk semua warga negara dan tidak boleh ada yang kebal hukum. Untuk menjaga supremasi hukum dibutuhkan sistem peradilan yang independen dan tidak bisa dikendalikan oleh individu atau kelompok atau pemerintah. Diperlukan prinsip yudisial mendasar seperti *habeas corpus*, pengadilan oleh juri dan proses hukum untuk mencegah mereka yang berkuasa untuk menggunakan hukum untuk kepentingan mereka sendiri. Kekuasaan (supremasi) hukum memiliki akibat membahagiakan lainnya - dia membuat hidup lebih bisa diprediksi, karena hukum memungkinkan masyarakat untuk mengantisipasi bagaimana orang-orang (termasuk para pejabat) akan dan tidak akan berbuat. Dengan kemampuan prediksi, individu dapat membuat rencana jangka panjang tanpa perlu takut rencana ini akan dihancurkan oleh pihak lain.

7. Keteraturan spontan

Kaum liberal tidak percaya bahwa masyarakat yang kompleks membutuhkan pemerintahan yang besar dan berkuasa untuk menjalankannya. Bagi mereka, keteraturan sosial bukan berasal dari rancangan pemerintah melainkan tindakan spontan manusia. Bahasa, adat istiadat, budaya, pasar dan jasa bukanlah hasil rancangan pemerintah melainkan merupakan tindakan manusia secara spontan.

8. Kepemilikan, perdagangan dan pasar

Kaum liberal percaya bahwa kesejahteraan/kekayaan tidaklah diciptakan oleh pemerintah, tetapi oleh kerjasama antara berbagai individu dalam keteraturan spontan mekanisme pasar. Kesejahteraan tercipta lewat individu merdeka yang menemukan, menciptakan, menabung, berinvestasi dan, tentu saja mempertukarkan barang dan jasa secara sukarela, untuk keuntungan bersama. Hal ini merupakan keteraturan spontan dari ekonomi pasar bebas.

9. Masyarakat Sipil

Manusia tidak sekedar individu yang terlepas dari orang lain karena itu berserikat dan berkumpul untuk menyediakan kebutuhan individu adalah cara terbaik ketimbang disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan ini, individu akan mengorganiskan diri sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri. Inilah yang menjadi dasar masyarakat sipil. Dalam lembaga-lembaga bentukan warga negara inilah kaum liberal berinteraksi dan saling terhubung dengan yang lain untuk membangun saling pengertian dan menyediakan kebutuhan bersama dan membangun.

10. Nilai manusia yang sama

Kaum liberal percaya bahwa nilai kemanusiaan yang sama menjadi dasar keuntungan hidup bersama. Mereka yakin bahwa prinsip dasar kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan pribadi dalam hukum. Hal ini menjadi dasar bagi keteraturan spontan sosial yang baik yang didasarkan pada rasa saling menghormati, toleransi, non-agresi, kerja sama dan pertukaran sukarela antara orang-orang yang bebas. Kaum liberal tahu bahwa masyarakat yang baik tidak bisa hanya bersandar hanya pada kebaikan manusia. Tetapi bersandar pada kerja sama

damai antara berbagai individu yang saling berbeda dan mementingkan diri. Karena itu, kelompok ini setuju dengan kebebasan dan persamaan di depan hukum, dengan sistem peradilan yang kuat dan bisa dipercaya yang mencegah adanya tebang pilih dalam implementasi hukum.

Dalam perkembangannya liberalisme mendapatkan beberapa kritikan tajam dari para ahli sosial (Minogue, 2008):

- a) Liberalisme sering mengaburkan realitas sosial dan politik. Manusia merupakan makhluk individual sekaligus sosial. Pemikiran liberal cenderung menekankan sisi individu seseorang sehingga manusia dipandang cenderung berkonflik dengan sesamanya atau malah sering disebut borjuis. Kritik ini disanggah dengan mengatakan aspek kreativitas individu menjadi penting dan dengan kreativitas manusia bisa berkumpul dan memecahkan masalah bersama.
- b) Karena individualis maka liberalism cenderung dilihat sebagai jantung keserahan dunia dan egoism. Namun kritik ini mudah dipatahkan sebab berdasarkan data kaum liberalislah yang paling sering memberi bantuan.
- c) Liberalisme menyamaratakan tingkat rasional setiap orang padahal sebenarnya tidak sama.
- d) Memberi kesempatan yang sama kepada semua orang kedengarannya bagus namun dalam realitas sosial tanpa intervensi dari pemerintah yang lemah/kurang akan selalu di bawah ditekan oleh mereka yang memiliki uang dan pengaruh dan kuasa.
- e) Penekanan pada kebebasan pada akhirnya akan merusak ikatan yang menyatukan dan menjaga tatanan sosial.
- f) Netralitas negara merupakan sebuah ilusi karena negara pasti akan melakukan intervensi kepada kehidupan bersama.

B. Multikulturalisme

Sejak awal munculnya, multikulturalisme dianggap sebagai suatu bentuk respek yang bersifat mutual dari satu etnik kepada etnik lain – dengan memberikan keleluasaan agar etnik lain dapat mengekspresikan budaya etniknya dan ekspresi

budaya etnik itu merupakan salah satu kontribusi bagi pengembangan budaya suatu bangsa (Liliweri, 2018). Dengan definisi ini dapat dikatakan bahwa multikulturalisme dapat dilihat dari perspektif sosiologis dan perspektif politik. Dari perspektif sosiologi, multikulturalisme merupakan suatu fakta sosial atau kondisi multikultural. Sementara dari perspektif politik, multikulturalisme merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mempertahankan keberagaman budaya etnik dalam masyarakat.

Multikulturalisme merupakan cara pandang terhadap entitas budaya dan pendukungnya yang beragam. Cara pandang ini menekankan pada pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman kebudayaan beserta pendukungnya sehingga dapat menjalankan fungsi hidup bersama dengan sebuah sistem yang harmonis (Arif, 2021). Dengan demikian dalam masyarakat multikultural, setiap kebudayaan mendapatkan penghargaan sekaligus memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kondisi sosia-kultural yang harmonis.

Akar dari multikulturalisme adalah kebudayaan di mana fungsinya merupakan pedoman kehidupan manusia sehingga konsep multikulturalisme tidak sama dengan konsep keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya. Penekanan multikulturalisme terletak pada kesederajatan aneka ragam kebudayaan lengkap dengan berbagai suku bangsa pendukungnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Parekh memetakan masyarakat multikulturalisme dalam lima kategori yang jelas. *Pertama*, isolasionis yang mengacu pada masyarakat yang memiliki berbagai kelompok kultural yang ada di dalamnya menjalankan kehidupan secara otonom dan terlibat dalam interaksi minimal antara satu dengan yang lainnya. *Kedua*, akomodatif yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. *Ketiga*, otonomis yaitu masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. *Keempat*, kritis atau interaktif yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu *concern* dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih

menuntut penciptaan kultural kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. *Kelima*, kosmopolitan yakni masyarakat yang berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat dan komit terhadap budaya tertentu sebaliknya bebas terlibat dalam eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing (Suharno, 2021).

Multikulturalisme menekankan pada keragaman sosial yang setara di mana terjadi hubungan timbal balik dalam masyarakat. Hubungan resiprokal ini merupakan hal yang substansial. Syarat agar hubungan kesalingan ini berjalan harmonis dibutuhkan tiga syarat mendasar yang menjadi kompetensi normatif yakni kompetensi kebudayaan, kompetensi kemasyarakatan dan kompetensi kepribadian (Arif, 2021). Kompetensi kebudayaan merupakan kumpulan pengetahuan yang memungkinkan bagi siapapun yang terlibat dalam tindakan komunikatif dapat membuat interpretasi-interpretasi yang dapat mengkondisikan tercapainya konsensus bersama. Kompetensi kemasyarakatan merupakan tatanan-tatanan yang sah yang terdapat di tengah-tengah masyarakat multikultural yang memungkinkan bagi siapapun untuk terlibat dalam tindakan komunikatif sehingga membentuk solidaritas yang harmonis. Sedangkan kompetensi kepribadian merupakan kemampuan yang memungkinkan seseorang dapat berpikir, berbicara dan bertindak sehubungan dengan partisipasinya dalam hubungan timbal balik di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang multikultural.

Dari ketiga kompetensi yang harus dikuasai oleh seseorang dalam masyarakat multikultural ini maka dapat dikatakan bahwa multikulturalisme bukan sekedar mengakui yang berbeda tetapi lebih merupakan penempatan perbedaan secara simetris dengan mengakui adanya pluralitas identitas dalam masyarakat. Melalui pengakuan pluralitas identitas maka masyarakat tidak lagi terjebak pada isu-isu primordial dan atau isu-isu sektarian yang dapat mengancam keharmonisan hidup bersama.

Multikulturalisme lahir dari perubahan sosial dan realitas kehidupan manusia sendiri yang disambut dengan berbagai kebijakan negara. Namun demikian ada tiga faktor pendorong utama hingga multikulturalisme dapat diterima dan diserap oleh

hampir semua negara yakni perkembangan hak asasi manusia, globalisasi dan demokratisasi (Tilaar, 2005). (a) Dalam sejarah kehidupan manusia, ada sebuah masa di mana hak kemanusiaan seseorang atau sekelompok orang ditindas oleh rezim penjajah, otoritarianisme dan pemerintah kerajaan absolut. Namun setelah perang dunia kedua, PBB mencetuskan kesepakatan bersama antarbangsa pada tahun 1948 yakni *Universal Declaration of Human Right*. Deklarasi ini merupakan permulaan dari gerakan lama dan panjang dalam menegakan hakikat hidup manusia yang sama dan setara tanpa membedakan warna kulit, agama, kepercayaan dan asal-usul. (b) kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadikan dunia seperti sebuah desa global (*global village*). Ruang dan waktu semakin dipersingkat malah saat ini seperti sudah tidak menjadi sebuah masalah bagi manusia untuk saling berhubungan. Situasi ini membuat hubungan antarmanusia yang beragam dapat terjadi dengan mudah, murah dan cepat. Inilah globalisasi di mana budaya baru datang begitu cepat ke suatu tempat dan budaya setempat tidak bisa menolak budaya baru tersebut. Sebaliknya, budaya setempat dapat memperkenalkan diri kepada orang dari budaya lain di tempat asalnya atau ke tempat lain. Dalam situasi semacam ini, kemungkinan benturan antarbudaya sangat memungkinkan. (c) Demokratisasi menjamin semua warga negara memberikan pendapat dan suaranya tanpa perlu khawatir. Hal ini menjadi faktor lain yang mendorong perkembangan multikulturalisme. Demokratisasi melahirkan pengenalan dan pengakuan terhadap budaya yang beragam dan dengan pengakuan terhadap keberagaman budaya berarti mengakui juga hak asasi manusia. Hal ini dipermudah dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.

Karenanya, dapat dikatakan bahwa multikulturalisme sejalan dengan perkembangan hak asasi manusia, globalisasi dan demokratisasi yang menjadi ciri utama dari kehidupan sosial abad 21.

Menurut Berghe (PGSD/MI, 2020) masyarakat multikulturalis memiliki beberapa sifat (1) terjadinya segmentasi dalam bentuk kelompok sub kebudayaan berbeda satu sama lain; (2) memiliki tatanan sosial yang terbagi dalam lembaga; (3) kurang mengembangkan konsensus di antara anggota; (4) terdapat integrasi sosial yang

tumbuh berdasarkan paksaan dan saling membutuhkan dalam ekonomi dan (5) adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lain.

Selain itu, terdapat tiga masalah pokok yang berkaitan dengan pemikiran multikulturalisme yakni identitas kelompok, globalisme dan nasionalisme dalam kemasakan negara bangsa (Tilaar, 2005). Masalah identitas kelompok muncul manakala globalisasi menyebar ke semua aspek kehidupan manusia sehingga berbagai etnis dan kelompok merasa khawatir identitas kelompoknya akan menghilang karena maraknya budaya massa. Kekhawatiran ini mendorong kelompok melakukan resistensi dan penguatan identitas kelompok. Efek lanjutnya adalah makin menguatnya polarisasi antara kekuatan kelompok dalam negara bangsa. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan negara bangsa yang kembali tersekat-sekat. Globalisasi juga pada akhirnya meninggalkan masalah baru bagi budaya nasional dan budaya lokal/kelompok.

Dalam situasi semacam ini dibutuhkan sikap kritis yang relevan dikembangkan dalam masyarakat multikulturalis yakni: (a) mengembangkan sikap toleransi dalam menghadapi segala perbedaan budaya, ras, suku, agama agar tercipta integrasi dalam masyarakat. (b) meninggalkan sikap prasangka buruk atas suku, bangsa, ras, agama yang berbeda yang dapat menimbulkan perpecahan dalam kehidupan masyarakat yang multikultural. (c) Mengembangkan sikap cinta tanah air dengan tulus akan membawa negara pada kesatuan dan persatuan serta mengesampingkan segenap perbedaan dan (d) mengembangkan kesadaran setiap individu sebagai anggota masyarakat yang memiliki peranan masing-masing yang disesuaikan dengan status atau kedudukan yang dimilikinya (PGSD/MI, 2020).

C. Toleransi

Dalam masyarakat majemuk dibutuhkan sikap menghormati satu sama lain agar kehidupan bersama tetap aman dan terjaga. Sikap menghormati tersebut dikenal dengan toleransi. Toleransi berarti membiarkan keberadaan seseorang atau sekelompok orang atau sesuatu yang berbeda atau kurang disukai dengan kesabaran sehingga hal tersebut dapat bertahan. Karena itu, toleransi tidak cukup diidentifikasi

sebagai sebuah sikap melainkan juga sebuah kesadaran, suatu cara berpikir yang kekhasannya terletak pada kemauan untuk saling menerima dan menghormati perbedaan (Jafar, Muhammad, 2020). Toleransi menjadi sebuah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghargai dan kerja sama antarkelompok masyarakat yang berbeda dalam etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama berdasarkan prinsip saling menghormati. Dengan demikian maka toleransi bukan saja mengakui eksistensi dan hak orang lain, lebih dari itu terlibat dalam usaha mengetahui dan memahami adanya kemajemukan (Imam, 2021).

Penjelasan singkat di atas memberi konsekuensi lanjutan yakni terdapat dua jenis toleransi yakni toleransi positif dan toleransi negatif (Ruslan, 2020). Toleransi negatif hanya mensyaratkan cukup dengan membiarkan dan tidak menyakiti individu dan kelompok lain. Sedangkan toleransi positif membutuhkan tidak sekedar “membiarkan” orang lain, lebih dari itu juga membutuhkan bantuan dan kerjasama individu atau kelompok lain.

Toleransi penting dalam masyarakat demokratis yang pluralistik karena *pertama*, toleransi dapat membantu menjaga masyarakat bersama-sama, bahkan dalam menghadapi konflik yang intens. Jika ada ketaatan umum aturan kesetaraan dan toleransi maka konflik dapat diatasi dengan damai. *Kedua*, toleransi merupakan bagian dari hak-hak sipil di mana individu-individu dapat harapan di alam demokrasi. Individu seyogyanya dapat hidup tanpa rasa takut mengalami kekerasan mental dan fisik. *Ketiga*, intoleransi melanggar kebebasan individu atau warga negara karena kebebasan dan toleransi merupakan dua hal yang saling terkait (Djafar, 2018).

Maskuri mengemukakan bahwa toleransi memiliki unsur-unsur intrinsik yang perlu dihidupkan agar sikap tersebut dapat dikategorikan sebagai sikap toleransi yakni memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada orang lain, mengaku hak setiap orang, menghormati hak orang lain dan saling mengerti (Jafar, Muhammad, 2020).

Unsur-unsur intrinsik toleransi pada akhirnya akan dimunculkan dalam sikap dan perilaku yang kelihatan ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain yang berbeda. Bentuk nyata dari toleransi dapat dilihat dalam sikap dan perilaku berikut:

(a) Menghargai dan menghormati hak orang lain

- (b) Tidak mendeskriminasi atau membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku, agama, ras dan gender
- (c) Tidak memngganggu atau menyakiti kebebasan orang lain dalam memilih agama, keyakinan politik dan memilih kelompok
- (d) Berlapang dada dalam menerima semua perbedaan
- (e) Tidak memaksakan orang lain sehubungan dengan keyakinan
- (f) Memberi kebebasan orang lain untuk memilih keyakinan
- (g) Tetap bergaul dengan orang yang berbeda
- (h) Menghormati orang lain yang sedang beribadah
- (i) Tidak membenci atau menyakiti perasaan orang yang berbeda pendapat dan keyakinan (Jafar, Muhammad, 2020).

Dalam hidup bersama masyarakat plural terutama dalam isu sensitive yakni agama, tidak semua orang dapat memahami dan menjalankan sikap toleransi. Digdoyo mengemukakan bahwa intoleransi dan konflik umat beragama terjadi disebabkan oleh (1) terbatasnya pengetahuan pemeluk agama akan agama sendiri dan agama orang lain. (2) Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. (3) Sikap tanggung jawab dari setiap pemeluk agama yang mengandung misi dakwah dan tugas dakwah masing-masing. (4) Keterbatasan pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat dalam menjalankan ibadah agama. (5) Fanatisme para pemeluk agama yang tidak mampu mengontrol diri sehingga tidak menghormati bahkan menghargai agama lain. (6) Adanya kecurigaan antarumat beragama, baik internal maupun eksternal serta antarumat beragama dengan pemerintah. (7) Masalah ketidakadilan sosial dan ekonomi. Bila terjadi ketimpangan sosial ekonomi maka kedua factor itu akan memicu sikap intoleran (Jafar, Muhammad, 2020).

Tidak hanya dalam kehidupan beragama yang beragama, dalam kehidupan sosial politik pun sering muncul intoleransi masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Terdapat tujuh faktor yang menyebabkan intoleransi dalam konteks sosial politik yang muncul dan atau digunakan. (a) Ketika seseorang atau sekelompok orang merasa kepentingannya terancam atau merasa kehilangan manfaat, kekuasaan dan

hak-hak eksklusifnya. (b) buah dari fanatisme dan dogmatisme yakni “pandangan dan keyakinan saya benar dan selalu benar”. Sikap inilah yang melahirkan pelabelan negative kepada orang atau kelompok lain. (c) bentuk dari praktik “politik perut”. Untuk mendapatkan tujuannya, orang menghalalkan segala cara termasuk tidak toleran dengan orang lain. (d) saat jalan dialog dan keterlibatan konstruktif dibatasi atau dimatikan. Pluralisme hanya dapat terjadi jika wawasan dan lingkungan terbuka dan bebas terhadap yang berbeda. (e) hasil pengabaian warga dan aktor politik tentang aturan demokrasi. (f) Aturan tidak ada atau tidak jelas, tidak ditegakan atau ditegakan dengan tidak adil. (g) hasil dari sikap aktor politik dan individu yang telah kehilangan daya Tarik nasional dan popularitas karena itu terpaksa menggunakan isi suku, agama, etnis untuk kelangsungan hidup politiknya (Djafar, 2018).

Referensi

- Arif, M. (2021). *Model Kerukunan Umat Beragama*. Para Citra Madina.
- Butler, E. (2019). *Liberalisme Klasik* (M. Iksan (ed.)). FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION INDONESIA.
- Djafar, M. A. (2018). *Intoleransi: Memahami Kebencian dan Kekerasan atas Nama Agama*. Elex Media Komputindo.
- Imam, M. (2021). *Pendidikan Karakter Toleransi*. Nusa Media.
- Jafar, Muhammad, et al. (2020). *Pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal* (T. Lestari (ed.)). Jakad Media Publishing.
- Liliwari, A. (2018). *Prasangka, Konflik dan Komunikasi Antarbudaya*. Kencana Prenada Media Group.
- Minogue, R. K. (2008). Liberalism. In *Ensiklopedi Pemikiran Sosial Modern* (Kedua, pp. 456–459). Kencana Prenada Media Group.
- Nando, K. R. (2020). *Liberalisme: Pengantar Filsafat*. <https://Feelsafat.Com/>. <https://feelsafat.com/2022/05/liberalisme.html>
- PGSD/MI, T. D. (2020). *Memperkuat Identitas Bangsa melalui Pendidikan Multikultural: Konsep - Prinsip - Implementasi*. Guepedia.
- Roland, W. W. (2000). Liberalism. In *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial* (2nd ed., pp. 268–271). Raja Grafindo Persada.
- Rusian, I. (2020). *Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Suharno. (2021). *Pendidikan Multikulturalisme, Konsep, Tata Kelola dan Praktek Penyelesaian Konflik Multikultural* (D. Prasetyo (ed.)). Insania.
- Suyudi, B. S. (2003). *Politik Komunikasi* (Pertama). Grasindo.
- Tilaar, H. A. R. (2005). Pendidikan dalam Multikulturalisme. In *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat*. Depertemen Kebudayaan dan Pariwisata RI.

BAB II

PENTINGNYA MATA KULIAH MULTIKULTURALISME BAGI BANGSA INDONESIA DARI PERSPEKTIF KAJIAN KRITIS PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA

A. Multikulturalisme sebagai Sebuah Konsep

Sejak awal munculnya, multikulturalisme dianggap sebagai suatu bentuk respek yang bersifat mutual dari satu etnik kepada etnik lain – dengan memberikan keleluasaan agar etnik lain dapat mengekspresikan budaya etniknya dan ekspresi budaya etnik itu merupakan salah satu kontribusi bagi pengembangan budaya suatu bangsa (Liliweri, 2009). Dengan definisi ini dapat dikatakan bahwa multikulturalisme dapat dilihat dari perspektif sosiologis dan perspektif politik. Dari perspektif sosiologi, multikulturalisme merupakan suatu fakta sosial atau kondisi multikultural. Sementara dari perspektif politik, multikulturalisme merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mempertahankan keberagaman budaya etnik dalam masyarakat.

Multikulturalisme merupakan cara pandang terhadap entitas budaya dan pendukungnya yang beragam. Cara pandang ini menekankan pada pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman kebudayaan beserta pendukungnya sehingga dapat menjalankan fungsi hidup bersama dengan sebuah sistem yang harmonis (Arif, 2021). Multikulturalisme pada akhirnya sebuah konsep untuk membangun kekuatan sebuah bangsa yang tersisih dari berbagai latar belakang etnik, agama, ras, budaya dan bahasa dengan menghargai dan menghormati hak-hak sipil mereka, termasuk hak-hak kelompok minoritas. Sikap apresiatif tersebut akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membesarkan sebuah bangsa, karena mereka akan menjadi besar dengan kebesaran bangsa (Firman, 2015). Dengan demikian dalam masyarakat multikultural, setiap kebudayaan mendapatkan penghargaan sekaligus memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kondisi sosia-kultural yang harmonis.

Akar dari multikulturalisme adalah kebudayaan di mana fungsinya merupakan pedoman kehidupan manusia sehingga konsep multikulturalisme tidak sama dengan konsep keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya. Penekanan

multikulturalisme terletak pada kesederajatan aneka ragam kebudayaan lengkap dengan berbagai suku bangsa pendukungnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Parekh memetakan masyarakat multikulturalisme dalam lima kategori yang jelas. Pertama, isolasionis yang mengacu pada masyarakat yang memiliki berbagai kelompok kultural yang ada di dalamnya menjalankan kehidupan secara otonom dan terlibat dalam interaksi minimal antara satu dengan yang lainnya. Kedua, akomodatif yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Ketiga, otonomis yaitu masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Keempat, kritikal atau interaktif yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu concern dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultural kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. Kelima, kosmopolitan yakni masyarakat yang berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat dan komit terhadap budaya tertentu sebaliknya bebas terlibat dalam eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing (Suharno, 2021).

Multikulturalisme menekankan pada keragaman sosial yang setara di mana terjadi hubungan timbal balik dalam masyarakat. Hubungan resiprokal ini merupakan hal yang substansial. Syarat agar hubungan kesalingan ini berjalan harmonis dibutuhkan tiga syarat mendasar yang menjadi kompetensi normatif yakni kompetensi kebudayaan, kompetensi kemasyarakatan dan kompetensi kepribadian (Arif, 2021). Kompetensi kebudayaan merupakan kumpulan pengetahuan yang memungkinkan bagi siapapun yang terlibat dalam tindakan komunikatif dapat membuat interpretasi-interpretasi yang dapat mengkondisikan tercapainya konsensus bersama. Kompetensi kemasyarakatan merupakan tatanan-tatanan yang sah yang terdapat di tengah-tengah masyarakat multikultural yang memungkinkan bagi siapapun untuk terlibat dalam

tindakan komunikatif sehingga membentuk solidaritas yang harmonis. Sedangkan kompetensi keperibadian merupakan kemampuan yang memungkinkan seseorang dapat berpikir, berbicara dan bertindak sehubungan dengan partisipasinya dalam hubungan timbal balik di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang multikultural.

Dari ketiga kompetensi yang harus dikuasai oleh seseorang dalam masyarakat multikultural ini maka dapat dikatakan bahwa multikulturalisme bukan sekedar mengakui yang berbeda tetapi lebih merupakan penempatan perbedaan secara simetris dengan mengakui adanya pluralitas identitas dalam masyarakat. Melalui pengakuan pluralitas identitas maka masyarakat tidak lagi terjebak pada isu-isu primordial dan atau isu-isu sektarian yang dapat mengancam keharmonisan hidup bersama.

Multikulturalisme lahir dari perubahan sosial dan realitas kehidupan manusia sendiri yang disambut dengan berbagai kebijakan negara. Namun demikian ada tiga faktor pendorong utama hingga multikulturalisme dapat diterima dan diserap oleh hampir semua negara yakni perkembangan hak asasi manusia, globalisasi dan demokratisasi (Tilaar, 2005). (a) Dalam sejarah kehidupan manusia, ada sebuah masa di mana hak kemanusiaan seseorang atau sekelompok orang ditindas oleh rezim penjajah, otoritarianisme dan pemerintah kerajaan absolut. Namun setelah perang dunia kedua, PBB mencetuskan kesepakatan bersama antarbangsa pada tahun 1948 yakni Universal Declaration of Human Right. Deklarasi ini merupakan permulaan dari gerakan lama dan panjang dalam menegakan hakikat hidup manusia yang sama dan setara tanpa membedakan warna kulit, agama, kepercayaan dan asal-usul. (b) kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadikan dunia seperti sebuah desa global (global village). Ruang dan waktu semakin dipersingkat malah saat ini seperti sudah tidak menjadi sebuah masalah bagi manusia untuk saling berhubungan. Situasi ini membuat hubungan antarmanusia yang beragam dapat terjadi dengan mudah, murah dan cepat. Inilah globalisasi di mana budaya baru datang begitu cepat ke suatu tempat dan budaya setempat tidak bisa menolak budaya baru tersebut. Sebaliknya, budaya setempat dapat memperkenalkan diri kepada orang dari budaya lain di tempat asalnya atau ke tempat lain. Dalam situasi semacam ini, kemungkinan benturan

antarbudaya sangat memungkinkan. (c) Demokratisasi menjamin semua warga negara memberikan pendapat dan suaranya tanpa perlu khawatir. Hal ini menjadi faktor lain yang mendorong perkembangan multikulturalisme. Demokratisasi melahirkan pengenalan dan pengakuan terhadap budaya yang beragam dan dengan pengakuan terhadap keberagaman budaya berarti mengakui juga hak asasi manusia. Hal ini dipermudah dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.

Karenanya, dapat dikatakan bahwa multikulturalisme sejalan dengan perkembangan hak asasi manusia, globalisasi dan demokratisasi yang menjadi ciri utama dari kehidupan sosial abad 21.

Menurut Berghe (PGSD/MI, 2020) masyarakat multikulturalis memiliki beberapa sifat (1) terjadinya segmentasi dalam bentuk kelompok sub kebudayaan berbeda satu sama lain; (2) memiliki tatanan sosial yang terbagi dalam lembaga; (3) kurang mengembangkan konsensus di antara anggota; (4) terdapat integrasi sosial yang tumbuh berdasarkan paksaan dan saling membutuhkan dalam ekonomi dan (5) adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lain.

Selain itu, terdapat tiga masalah pokok yang berkaitan dengan pemikiran multikulturalisme yakni identitas kelompok, globalisme dan nasionalisme dalam kemasakan negara bangsa (Tilaar, 2005). Masalah identitas kelompok muncul manakala globalisasi menyebar ke semua aspek kehidupan manusia sehingga berbagai etnis dan kelompok merasa khawatir identitas kelompoknya akan menghilang karena maraknya budaya massa. Kekhawatiran ini mendorong kelompok melakukan resistensi dan penguatan identitas kelompok. Efek lanjutnya adalah makin menguatnya polarisasi antara kekuatan kelompok dalam negara bangsa. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan negara bangsa yang kembali tersekat-sekat. Globalisasi juga pada akhirnya meninggalkan masalah baru bagi budaya nasional dan budaya lokal/kelompok.

Dalam situasi semacam ini dibutuhkan sikap kritis yang relevan dikembangkan dalam masyarakat multikulturalis yakni: (a) mengembangkan sikap toleransi dalam menghadapi segala perbedaan budaya, ras, suku, agama agar tercipta integrasi dalam masyarakat. (b) meninggalkan sikap prasangka buruk atas suku, bangsa, ras, agama

yang berbeda yang dapat menimbulkan perpecahan dalam kehidupan masyarakat yang multikultural. (c) Mengembangkan sikap cinta tanah air dengan tulus akan membawa negara pada kesatuan dan persatuan serta mengesampingkan segenap perbedaan dan (d) mengembangkan kesadaran setiap individu sebagai anggota masyarakat yang memiliki peranan masing-masing yang disesuaikan dengan status atau kedudukan yang dimilikinya (PGSD/MI, 2020).

B. Faktor-Faktor Penyebab Multikulturalisme di Indonesia dan Implikasinya

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan total jumlah pulau sebanyak 17.508 (Australia, 2018). Penduduk Indonesia tahun 2022 sebanyak 275 773,8 jiwa (BPS, 2022a) yang terdiri atas 1.340 suku bangsa (Welianto, 2020) di antaranya 633 kelompok suku bangsa besar (BPS, 2022b). Dengan jumlah semacam ini, Indonesia menjadi negara keempat terpadat di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Hal ini juga yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang pendudukannya multietnis di dalam hamparan luas dan banyaknya pulau yang ada.

Keragaman masyarakat Indonesia sebenarnya sudah disadari oleh para *founding fathers* bangsa ini ketika mereka membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran itu bermula dari Sumpah Pemuda yang mereka ikrarkan jauh sebelum terbentuknya negara ini yakni pada 28 Oktober 1928 dengan menandatangani tiga point utama yakni keberagaman negara bangsa yang mereka cita-cita itu perlu dipersatukan oleh tanah air yang satu, bangsa yang satu dan bahasa yang satu. Kesadaran ini kemudian dilanjutkan dan disahkan menjadi motto negara Indonesia yakni Bhineka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi satu. Dengan motto ini, para pendiri bangsa ini menyadari keragaman masyarakat Indonesia yang ingin mereka bentuk namun pada saat yang sama secara simultan mengikatnya dalam semboyan ini agar semua masyarakat sadar identitas sesungguhnya dari ke-Indonesia-an ini yakni keberagaman atau multikulturalisme.

Keragaman masyarakat Indonesia yang multietnis semacam ini sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang sudah ada semenjak dahulu kala

sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktor-faktor tersebut yakni (Putri, 2020):

1. Faktor sejarah masyarakat Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan rempah-rempah. Kekayaan ini menarik banyak bangsa dari luar seperti China, Arab, India, Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang untuk datang ke Indonesia. Kedatangan mereka selain mencari rempah-rempah dan berdagang namun ada juga yang menetap di Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadi perkawinan lintas suku yang menambah jumlah budaya dan ras di Indonesia.

2. Faktor pengaruh kebudayaan asing

Akibat dari banyak jumlah suku bangsa yang datang ke Indonesia menyebabkan terjadinya percampuran suku bangsa yang menyebabkan semakin kaya dan beragamnya suku bangsa dan etnis di Indonesia.

3. Faktor geografis

Secara geografis, letak Indonesia berada pada posisi yang strategis karena di antara dua benua – Asia dan Australia dan dua samudera – samudera Pasifik dan Samudera Hindia yang merupakan jalur perdagangan sejak dahulu kala. Sebagai Jalur perdagangan, Indonesia menjadi tujuan dan perantara perdagangan para pedagang yang datang dari China, Arab, India dan Eropa. Hal ini mendorong pengaruh multikulturalisme bagi masyarakat Indonesia.

4. Faktor fisik dan geologi

Secara geologis, ada tiga lempengan benua yang menghimpit Indonesia yakni Asia, Australia dan Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara berkepulauan terbesar di dunia yang membuat penduduk dan budayanya berbeda. Kondisi fisik ini mempengaruhi tipe manusia Indonesia yang terbagi menjadi tipe Asiatis, Tipe Peralihan dan Tipe Australis.

5. Faktor iklim

Keadaan iklim dan geografis masyarakat Indonesia yang beragam mempengaruhi manusia Indonesia pula. Misalnya, manusia pegunungan dengan cuaca yang sejuk

mempengaruhi manusia Indonesia di sana menjadi lebih tenang dan ramah dalam hidup dan kebudayaannya.

Situasi multikulturalis masyarakat semacam ini memberi dua potensi dampak bagi Indonesia. Potensi multikulturalisme ini jika dikelola dengan baik akan keanekaragaman masyarakat dan geografis bisa menjadi kekayaan sekaligus kekuatan yang dapat dijadikan modal untuk membangun negara dan bangsa Indonesia yang sangat kuat dan berlimpah. Namun keragaman ini juga menyimpan potensi konflik yang luar biasa besar. Jika tidak dikelola dengan baik potensi konflik ini akan meledak dan akan menyebabkan hancurnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari dalam.

Selama ini ada banyak persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia akibat keanekaragaman masyarakatnya. Kendala utama dialami masyarakat Indonesia dalam silang budaya (Firman, 2015) seperti (1) rendahnya tingkat pengetahuan, pengalaman, dan jangkauan komunikasi sebagian masyarakat sehingga rendahnya daya tangkal terhadap budaya asing; (2) kurang maksimalnya media komunikasi dalam memerankan fungsinya sebagai mediator dan korektor informasi dan (3) paradigma pendidikan yang lebih menekankan pengembangan intelektual dengan mengabaikan pengembangan kecerdasan emosional, pembentukan sikap moral, dan penanaman nilai budaya. Selain itu, bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami multi krisis: krisis kepemimpinan, krisis ideologi, krisis jati diri, krisis moral, dan krisis nasionalisme (Sudharto, 2012). Krisis ini berpangkal pada rendahnya komitmen partai politik terhadap kepentingan bangsa.

Upaya penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan membangun kehidupan multi kultural yang sehat, sehingga toleransi dan apresiasi antarbudaya meningkat. Selanjutnya permasalahan tersebut dapat juga diatasi dengan meningkatkan peran media komunikasi untuk melakukan sensor, strategi pendidikan yang berbasis budaya. Nilai-nilai budaya tradisional dapat terinternalisasi dalam proses pendidikan baik di lingkungan keluarga, pendidikan formal maupun non formal. Khususnya pendidikan di sekolah diperlukan adanya paradigma baru yang dapat

menyajikan model & strategi pembelajaran yang dapat menseimbangkan kehidupan masyarakat dari berbagai latar budaya (Firman, 2015).

Selain itu, terdapat tiga pola dasar untuk membangun integritas bangsa di tengah-tengah pluralisme etnik/pluralisme kultural (Sudharto, 2012) yaitu: 1) "Melting-pot" (arena kehidupan, terutama politik dijadikan ajang meleburnya berbagai kelompok etnik/cultural); 2) "*Mainstreaming/assimilation, conformity, compensatory*" (budaya induk yang statusnya lebih tinggi dipakai sebagai standar, kelompok-kelompok lain mengikuti kalau perlu diupayakan kompensasi-kompensasi terutama terhadap kelompok yang lemah dan berkekurangan). 3) "*Multi-cultural model*" (masing-masing kelompok etnik/ kultural memiliki kedudukan sama dan disorong berkembang dan pada saat yang sama upaya-upaya struktural diciptakan sebagai basis bersama membangun masyarakat bangsa).

C. Pendidikan Multikulturalisme

Dengan konteks masyarakat Indonesia yang sangat plural semacam ini maka negara perlu memberikan kesadaran kepada semua warga negara tentang pentingnya hidup bersama dengan damai dalam perbedaan. Namun hal tersebut sangat sulit dilakukan jika tidak diatur secara sistematis, terencana dan terstruktur. Rancangan tersebut harus menyentuh semua anak bangsa di dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, tugas ini dilaksanakan oleh semua komponen yang ada dalam masyarakat. Satu hal penting agar menyentuh semua lapisan masyarakat maka dilakukan secara formal. Hal tersebut hanya bisa dilakukan melalui lembaga pendidikan. Pendidikan multikulturalisme dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tidak hanya formal melainkan non formal dan informal di keluarga-keluarga. Khusus di lembaga pendidikan formal, pemerintah bertanggung jawab menyediakan kurikulum yang di dalamnya menyediakan mata pelajaran atau mata kuliah khusus tentang multikulturalisme khas Indonesia sehingga semua peserta didik, guru/dosen dan pegawai dapat memahami dan menjalankan program ini.

Pendidikan multikulturalisme sebenarnya sudah ada sejak dahulu yang terdapat dalam pelajaran/mata kuliah lain seperti pendidikan Pancasila, pendidikan

kewarganegaraan dan pendidikan agama. Namun bila ditelusuri lebih lanjut dalam pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia, mengungkapkan pendidikan multikultural di Indonesia belum berjalan sebagai mana mestinya, kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti (Kons, 2018): (1) sistem pendidikan yang tidak berorientasi pada rakyat, (2) tidak menumbuhkan kreatifitas peserta didik sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, (3) korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) merasuk ke dalam berbagai lini, (4) pemikiran barat yang tidak diadaptasi sebelumnya, (5) ketimpangan dari satu sosial, ekonomi dan domili, (6) kurikulum sarat ilmu pengetahuan dan belum tentu berguna dalam kehidupan, (7) siswa kurang bergairah dalam belajar karena kurang berorientasi budaya.

Oleh karena itu, penting untuk disediakan secara khusus pendidikan multikulturalisme dalam satu mata pelajaran atau mata kuliah khusus yang agar pembahasannya lebih luas sekaligus mendalam. Hal ini disebabkan karena isu ini sangat luas dan perlu ditelusuri tidak hanya soal teori namun juga perlu dipraktekkan di dilihat prakteknya dalam masyarakat.

Pentingnya pendidikan multikulturalisme di semua lembaga pendidikan terutama lembaga pendidikan formal karena pendidikan multikulturalisme memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Manfaat pendidikan multikulturalisme dapat dilihat sebagai (a) sarana alternatif pemecahan konflik; (b) Sarana sosialisasi bagi peserta didik agar tidak meninggalkan akar budaya; (c) Sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional; (d) Menuju masyarakat Indonesia yang multicultural (Puspita, 2018). Selain itu, terdapat keutamaan lain dari pendidikan multikulturalisme bagi masyarakat khususnya peserta yakni (1) Memberikan terobosan baru dalam ruang pendidikan yang mampu meningkatkan empati dan mengurangi prasangka peserta didik sehingga tercipta manusia (warga negara) antar budaya yang mampu menyelesaikan konflik dengan tanpa kekerasan (nonviolent); (2) Menerapkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang potensial dalam mengedepankan proses interaksi sosial dan memiliki kandungan afeksi yang kuat; (3) Model pembelajaran multikultural membantu pendidik dalam mengelola proses pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif, terutama memberikan kemampuan

peserta didik dalam membangun kolaboratif dan memiliki komitmen nilai yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang serba majemuk; (4) Memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia dalam penyelesaian dan mengelola konflik yang bernuansa SARA yang timbul di masyarakat dengan cara meningkatkan empati dan mengurangi prasangka (Susanti, 2020).

Pendidikan multikultural dapat difahami sebagai sebuah sistem pendidikan dimana pola dan sistem pembelajaran memberikan ruang yang sama bagi seluruh warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa ada diskriminasi (Firdaus et al., 2015). Sementara menurut Azumardi Azra, pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti (*difference*), atau “*politics of recognition*” politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas (Ibrahim, 2013). Perspektif yang mirip juga dikemukakan Yanni Puspita bahwa pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekwensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran agama (Puspita, 2018). Pengertian-pengertian di atas dapat dimengerti bahwa pendidikan multikulturalisme dilakukan sebagai sebuah proses yang tiada akhir.

Dengan demikian maka, pendidikan multikulturalisme semestinya berkaitan dengan tiga hal penting (Hanum, 2004) yakni (1) Kesadaran akan nilai pentingnya Keragaman. Peserta didik perlu memiliki kesadaran bahwa semua peserta didik berbeda dari usia, agama, gender, suku, etnis, ras dan budaya yang tidak bisa ditolak. Namun perbedaan itu bukanlah sebuah halangan untuk seseorang mendapatkan haknya dalam pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Perbedaan tersebut harus bisa diterima dalam sebuah kewajaran dalam kehidupan bermasyarakat dan hidup bersamanya secara berdampingan dalam suasana damai. (2) Gerakan Pembaharuan Pendidikan. Pendidikan multikulturalisme bukan sekedar praktik aktual dalam mata kuliah namun mencakup semua aspek pendidikan. (3) Proses Pendidikan. Pendidikan multikulturalisme merupakan sebuah proses yang tidak sekali jadi dan tuntas melainkan proses yang berjalan terus menerus di mana dilakukan untuk memperbaiki prestasi dan cara hidup bukan untuk meningkatkan skor.

Menurut Manan, penanaman nilai-nilai multikulturalisme bukanlah sistem pendidikan itu sendiri, namun proses yang penanaman atau transformasi nilai melalui proses pendidikan formal maupun non formal, karena pendidikan adalah penanaman pengetahuan, keterampilan dan sikap pada masing-masing generasi dengan menggunakan pranata-pranata seperti sekolah-sekolah yang disengaja diciptakan untuk tujuan tersebut (Firdaus et al., 2015). Penanaman nilai multikulturalisme dapat dilakukan terhadap 3 ranah pendidikan, yaitu afektif, kognitif dan psikomotor (Firdaus et al., 2015). Sikap (afektif) adalah upaya untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan tentang budaya, toleransi budaya, penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsif terhadap budaya lain, keterampilan untuk menghindari dan meresolusi konflik. Kognitif (kognitif) adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain, dan kemampuan untuk menganalisis dan menerjemahkan perilaku kultural, dan pengetahuan tentang kesadaran perspektif kultural. Sedangkan psikomotorik (psikomotorik) adalah untuk memperbaiki distorsi, stereotip, dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran dengan memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang, memberikan alat-alat konseptual untuk komunikasi antar budaya dalam mengembangkan keterampilan interpersonal, memberikan teknik-teknik evaluasi, dan menjelaskan dinamika kultural

Calarry Sada menjelaskan pendidikan multikultural memiliki empat makna atau model (Firman, 2015), yaitu : (1) pengajaran tentang keragaman budaya sebuah pendekatan asimilasi kultural, (2) pengajaran tentang berbagai pendekatan dalam tata hubungan sosial, (3) pengajaran untuk memajukan pluralisme tanpa membedakan strata sosial dalam masyarakat, dan (4) pengajaran tentang refleksi keragaman untuk meningkatkan pluralisme dan kesamaan.

James Banks mengemukakan bahwa pendidikan multikultural punya lima dimensi yang saling terkait yang dapat membantu mewujudkan berbagai program agar peserta didik dapat memahami perbedaan di antara mereka (Ibrahim, 2013). Kelima hal tersebut adalah (a) Dimensi integrasi isi/materi (*content*

integration). Dimensi ini digunakan oleh pendidik untuk memberikan keterangan dengan point utama pembelajaran multikulturalisme. (b) Dimensi konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*). Suatu dimensi dimana para pendidik membantu peserta didik untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki. (c) Dimensi pengurangan prasangka (*prejudice reduction*). Pendidik melakukan banyak usaha untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok. (d) Dimensi pendidikan yang sama/adil (*equitable pedagogy*). Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah peserta didik dari berbagai kelompok. (e) Dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and social structure*). Dimensi ini penting dalam memperdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda.

Dalam penerapannya pendidikan multikultural perlu mengedepankan tiga prinsip dasar seperti yang dikemukakan Tilaar yakni (1) Pendidikan multikultural didasar pada pedagogik kesetaraan manusia (*equity pedagogy*). 2) Pendidikan multikultural ditujukan kepada terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. 3) Prinsip globalisasi tidak perlu ditakuti bangsa ini terhadap arah serta nilai-nilai baik buruk yang dibawanya (Puspita, 2018). Selain itu juga perlu diperhatikan prinsip lain dalam pendidikan multikulturalisme seperti yang dikemukakan oleh Will Kymlicka yakni (1) Hak-hak individual dan hak-hak kolektif dalam masyarakat; (2) Kebebasan bagi individual dan budaya yakni setiap individu termasuk dari etnik minoritas memiliki kebebasan untuk berkreasi, berkarya, bahkan mengembangkan dan memajukan budayanya; (3) Keadilan dan hak-hak minoritas; (4) Jaminan minoritas bisa berbicara dan terwakilkan aspirasinya dalam struktur pemerintahan atau legislatif; (5) Toleransi dan batas-batasnya, yakni bahwa etnik minoritas yang tidak memiliki wakil langsung di lembaga

legislatif atau dalam lembaga birokrasi pemerintahan, harus dilindungi oleh etnik atau kelompok mayoritas yang menguasai lembaga-lembaga pemerintahan (Firman, 2015).

Hal ini penting agar tujuan pendidikan dengan berbasis multikultural dapat tercapai seperti (Ibrahim, 2013) yakni (1) Untuk memfungsikan peranan dunia pendidikan dalam memandang keberadaan peserta didik yang beraneka ragam; (2) untuk membantu peserta didik dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok keagamaan; (3) memberikan ketahanan peserta didik dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya; (4) untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Selain itu, pendidikan multikulturalisme juga bertujuan untuk Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpatik, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda (Puspita, 2018).

D. Penutup

Indonesia merupakan negara bangsa yang penduduknya multikultur. Tidak mudah mengelola bangsa yang besar dengan jumlah penduduk yang banyak dan plural seperti Indonesia. Namun hal tersebut merupakan sebuah keharusan jika ingin negara bangsa ini bisa tetap berdiri sampai tahun-tahun ke depan. Dibutuhkan usaha bersama dari semua komponen masyarakat sejak manusia Indonesia sejak usia dini untuk menyedarkan keanekaragaman ini.

Salah satu cara yang bisa dilaksanakan oleh negara secara formal untuk menyentuh anak bangsa sejak dini yakni dilakukan melalui lembaga pendidikan terutama lembaga pendidikan formal dengan menyediakan mata pelajaran atau mata kuliah khusus yang berbicara tentang multikulturalisme khususnya multikulturalisme di Indonesia. Selain itu, semua lembaga swasta maupun negara perlu menyediakan format-format pendidikan nonformal lain yang dilakukan secara regular setiap tahun bagi anggota-anggotanya agar dapat memahami arti pentingnya multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan pemahaman akan indahny hidup bersama secara damai dengan segala perbedaan maka Indonesia bisa maju ke depan menyongsong masa depan.

Referensi

- Arif, M. (2021). *Model Kerukunan Umat Beragama*. Para Citra Madina.
- Australia, K. (2018). *Indonesia*. Keduataan Besar Republik Indonesia Di Canberra, Australia. <https://kemlu.go.id/canberra/id/read/indonesia/2186/etc-menu>
- BPS. (2022a). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2020-2022*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>
- BPS. (2022b). *Mengulik Data Suku di Indonesia*. <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>
- Firdaus, Yasin, F., & Anggreta, D. K. (2015). Penanaman Nilai-Nilai Multikulturalisme Melalui Pendidikan Untuk Menyiasati Masalah Multikultur Di Indonesia & Malaysia. *ASEAN Comparative Education Research Network Conference*, 1756–1767.
- Firman, F. (2015). SILANG BUDAYA DAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA. In *Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP Universitas Negeri Padang* (Vol. 4, Issue 1).
- Hanum, F. (2004). Multikulturalime Dan Pendidikan. *Multikulturalisme Dan Pendidikan*, 1–17.
- Ibrahim, R. (2013). PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam. *Addin*, 7(1), 129–154. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/573%0Ahttp://dx.doi.org/10.21043/addin.v7i1.573>
- Kons, F. M. (2018). PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN MASYARAKAT MAJEMUK INDONESIA. In *Fakultas Ilmu Pendidikan Univ. Negeri Padang* (Vol. 4, Issue 1).
- Liliweri, A. (2009). *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural* (2nd ed.). LKIS.
- PGSD/MI, T. D. (2020). *Memperkuat Identitas Bangsa melalui Pendidikan Multikultural: Konsep - Prinsip - Imlementasi*. Guepedia.
- Puspita, Y. (2018). Pentingnya Pendidikan Multikultural. *Seminar Nasional Pendidikan Universitas PGRI Palembang*, 285–291.
- Putri, A. (2020, February 17). 5 Faktor Keberagaman Bangsa Indonesia. *Kompas.Com, Skola*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/17/201500469/5-faktor-keberagaman-bangsa-indonesia?page=all>.

- Sudharto. (2012). Multikulturalisme Dalam Perspektif Empat Pilar Kebangsaan. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 2(1), 121-142.
<http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/593>
- Suharno. (2021). *Pendidikan Multikulturalisme, Konsep, Tata Kelola dan Praktek Penyelesaian Konflik Multikultural* (D. Prasetyo (ed.)). Insania.
- Susanti, Y. (2020). Pembelajaran Multi Kultural Di Sekolah. *Journal Of Arts Research*, 1, 1-15. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/harmonia/article/view/2535>
- Tilaar, H. A. R. (2005). Pendidikan dalam Multikulturalisme. In *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat*. Depertemen Kebudayaan dan Pariwisata RI.
- Welianto, A. (2020). Daftar Suku Bangsa di Indonesia. *Kompas.Com*, Skola. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/210000869/daftar-suku-bangsa-di-indonesia?page=all>

BAB III

MULTIKULTURALISME DAN PLURALISME AGAMA:

Studi Kasus Kerusuhan Kupang 30 November 1998

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan daerah kepulauan atau Indonesia mini. NTT memiliki 1.192 pulau (LOCALISE SDGs in Indonesia, 2018), 432 bernama, 134 belum diberi nama, 42 pulau dihuni oleh 16 suku asli dengan 69 bahasa daerah. NTT juga berbatasan langsung dengan negara Republik Demokratik Timor Leste dan Australia. Situasi geografis NTT ini memungkinkan NTT memiliki banyak kekayaan budaya yang variatif namun belum sepenuhnya ditelusuri dan dimanfaatkan untuk pembangunan manusia dan daerah. Di sisi lain, realitas geografis yang sama menjadi semacam kutukan bagi NTT dalam hal pembangunan. Hal ini terbukti, pada September 2021, Badan Pusat Statistik mengkategorikan NTT sebagai salah satu provinsi termiskin atau urutan ketiga termiskin dengan 20,44% di Indonesia (BPS, 2021). Kutukan lain yang dirasakan oleh NTT akibat multikulturalisme ini adalah potensi konflik sangat mungkin terjadi kapan saja jika keanekaragaman masyarakat ini tidak dikelola dengan sebaik-baiknya.

Kota Kupang sebagai ibu kota dan menjadi pusat perekonomian dan pendidikan di provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan tempat tujuan hampir semua warga NTT yang ada di berbagai kabupaten maupun luar NTT. Hal ini membuat warga NTT sangat beragam dan dinamis. Meskipun menjadi pusat ibu kota provinsi dan kota, pendidikan dan ekonomi di NTT, Kota Kupang pernah mengalami kerusuhan rasial khususnya terkait agama yang sangat mencorong dan melukai kehidupan masyarakat Kota Kupang dan masyarakat NTT secara umumnya.

Kerusuhan Kupang, 30 November 1998

Kerusuhan Kupang diawali ketika sejumlah organisasi pelajar/mahasiswa Kristen Kupang, minggu ketiga November 1998 melakukan aksi Hari Berkabung sebagai bentuk solidaritas terkait kerusuhan anti Kristen, pengrusakan dan pembakaran gereja di Ketapang Jakarta Pusat (Aziz, 2019). Hari berikutnya massa

bergerak menuju kampung Oesapa yang dihuni orang-orang Bugis, merusak atau membakar beberapa masjid, fasilitas Pendidikan, dan banyak rumah (S-20/BP/S-12/A-6/N-1, 1998).

Dari penelusuran yang dikumpulkan oleh aparat keamanan ditemukan bahwa kerusuhan Kupang diprovokasi oleh pihak luar daerah yang ingin mengadu domba masyarakat beragama dengan memanfaatkan konflik di luar NTT (S-20/BP/S-12/A-6/N-1, 1998), (Aziz, 2019). Upaya adu domba itu ternyata berhasil membuat kerusuhan rasial yang sangat membekas pada masyarakat Kota Kupang dan NTT secara keseluruhan. Dampak lanjut dari kerusuhan tersebut terlihat jelas dari sisi ekonomi, keamanan dan kerekatan sosial.

Situasi Terkini Kota Kupang

Setelah 24 tahun kerusuhan rasial di Kupang, saat ini Kota Kupang masuk dalam 10 besar kota yang paling toleran terhadap agama lain dari 94 kota se-Indonesia versi Setara Institute. Selama tiga tahun berturut-turut Kota Kupang masuk dalam 10 kota paling toleran di Indonesia – tahun 2018 di urutan 7 dengan skor 5.857 (Adhi, 2018), tahun 2020 di urutan 5 dengan skor 6.037 (Riana, 2021), dan tahun 2021 berada di urutan 4 dengan skor 6.337 (Permana, 2022). Penilaian Setara Institut ini dilakukan dengan menggunakan delapan indikator penilaian yakni rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya, kebijakan diskriminatif, pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi, tindakan nyata terkait peristiwa, peristiwa intoleransi, dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi, heterogenitas keagamaan penduduk dan inklusi sosial keagamaan (Chyntia, 2021).

Raihan Kota Kupang masuk sepuluh besar kota yang paling toleran dalam bidang agama di Indonesia sebenarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang telah ada dan berhasil dikembangkan oleh masyarakat, pemangku kepentingan dan pemerintah. Faktor utama yang dimiliki oleh masyarakat Kota Kupang adalah kearifan lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur (Aziz, 2019).

Masyarakat Kota Kupang berasal dari seluruh wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki beragam bahasa, kebiasaan, budaya, adat istiadat, agama dan cara pandang hidup bersama yang berbeda. Karena situasi yang berbeda inilah sejak awal masyarakat NTT bisa menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan yang tidak bisa ditolak. Perbedaan bukanlah sesuatu yang perlu diseragamkan melainkan sebagai bagian dari realitas hidup yang perlu ditata untuk menghasilkan harmoni dan kebaikan bersama.

Kearifan lokal lain yang berkembang dalam masyarakat NTT adalah pandangan mereka yang melihat darah yang mengalir dalam diri seseorang dan sesamanya merupakan hal utama dan pertama yang diterima yang termanifestasi dalam adat istiadat ketimbang agama. Oleh karena itu, masyarakat adat di NTT lebih mendahulukan adat daripada agama jika diperhadapkan keduanya. Adat menyatukan masyarakat jika agama membedakan manusia. Hal ini kelihatan dari segala tata laksana hidup manusia NTT yang selalu dimulai dengan adat. Misalnya, pernikahan manusia NTT terbagi dalam tiga bagian pernikahan. Pernikahan pertama dilangsungkan dalam ritual adat setelah itu agama dan kemudian administrasi negara.

Kearifan lokal semacam inilah yang dibawa masyarakat dari berbagai daerah ke Kota Kupang di mana mereka menetap dan mewarnai cara manusia Kota Kupang melihat perbedaan dan hidup dengan perbedaan tersebut.

Faktor lain yang membuat masyarakat Kota Kupang bisa hidup secara toleran dengan agama lain karena peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Peran FKUB NTT dalam membangun toleransi umat beragama di Kota Kupang dilakukan dengan program rutin dalam bentuk dialog, seminar, sosialisasi, lomba pidato serta lomba hyme dan mars kerukunan, program tidak rutin dalam bentuk penerbitan buku, pembuatan striker, kalender dan spanduk keagamaan (Taopan et al., 2020). Untuk mendorong terlaksana kehidupan toleransi antarumat beragama di Kota Kupang, FKUB NTT pun mengalami halangan dan hambatan seperti terbatas rapat, komunikasi dan fasilitas namun kelompok pemuka agama ini berupaya menjembatannya dengan melakukan diskusi antarbadan pengurus, berkomunikasi dengan pemerintah, melakukan sosialisasi internal dan memanfaatkan dana sebaik mungkin sambil

mengajukan berbagai proposal yang bertujuan mengembangkan kehidupan toleransi di Kota Kupang.

Dari penelitian lain ditemukan bahwa faktor-faktor yang mendukung masyarakat Kota Kupang bisa hidup rukun dan toleran dengan orang lain yang berbeda karena beberapa faktor ini: (1) geneologis, (2) peran pemuka agama, (3) masyarakat yang sadar sosial dan (4) peran tempat ibadah (Made & Sena, 2020). Faktor geneologis berkaitan dengan hubungan persaudaraan yang dimiliki oleh para pemeluk agama. Realitas keluarga di NTT dan Kota Kupang adalah satu keluarga inti atau keluarga besar, anggota keluarganya bisa memeluk agama yang berbeda namun tidak menimbulkan penolakan apalagi konflik. Hal tersebut merupakan pilihan pribadi yang harus dihormati anggota keluarga lain. Pilihan beragama adalah pilihan pribadi karena itu perlu dihormati dan tidak boleh ditolak pribadi tersebut dari keluarga.

Dalam masyarakat NTT, tokoh agama sangat dihormati. Karena itu, tokoh agama terdorong untuk menjadi suri teladan bagi umatnya dengan cara menerima perbedaan sebagai cara hidup bersama yang paling baik dalam hidup bermasyarakat yang majemuk seperti di Kota Kupang. Ketokohan pemimpin agama dijalankan dengan memberikan pembinaan dan pengajaran yang menyejukan bagi umatnya. Tokoh agama menjadi teman bagi umat yang menerima usulan umatnya yang akan diteruskan kepada pemuka agama lain atau umat dari agama lain dan pemerintah.

Kesadaran sosial masyarakat Kota Kupang tentang realitas hidup bersama yang heterogen dalam semua aspek membuat masyarakat Kota Kupang tidak hanya bersimpati kepada yang berbeda melainkan juga mengembangkan sikap empati dalam hidup bersama. Empati tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk pemberian pelayanan kepada umat yang berbeda dalam kehidupan keseharian dan moment-moment hari raya tiap agama.

Di Kota Kupang tempat beribadah memiliki berbagai fungsi yakni pembinaan karakter termasuk karakter untuk bisa hidup bersama dengan orang yang berbeda agama, suku dan pandangan. Rumah ibadah juga berfungsi sebagai tempat sosial di mana umat beragama bisa mengatasi konflik bersama dengan saling bertemu dan

berdialog. Rumah ibadah juga berfungsi sebagai tempat pendidikan di mana nilai-nilai luhur hidup bersama disampaikan dan diregenerasikan selain ajaran agama.

Penelitian lain menemukan bahwa masyarakat Kota Kupang bisa hidup berdampingan secara rukun dan damai dalam segala perbedaan dibalut oleh kerja sama dalam pembangunan tempat ibadah, perayaan hari besar agama dan dalam kegiatan politik (Sodli, 2009). Kerja sama-kerja sama ini didorong oleh faktor ajaran agama, pemerintah dan pemimpin agama.

Proyeksi Masa Depan

Dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, setiap orang bisa bertemu dengan realitas multikultural di mana saja. Saat seseorang membuka aplikasi Tiktok ia bisa bertemu dengan berbagai adegan singkat dari berbagai manusia dari berbagai pelosok dunia. Dengan aplikasi MolaTV, seseorang bisa berinteraksi dengan siapa saja dari seluruh belahan dunia kapan dan di mana saja menggunakan beragam bahasa. Dengan membuka Youtube, orang bisa menonton berbagai video blog dari berbagai penjuru dunia dengan beragam tema dengan beragam bahasa dan etnis di dalamnya.

Dengan kemajuan transportasi, setiap orang bisa menempati beberapa lokasi dan bertemu dengan beragam manusia dari berbagai etnis, suku dan agama dalam waktu beberapa jam saja. Seseorang bisa makan di Kupang, mandi di Solo, kerja di Jakarta lalu tidur di Makasar dalam waktu sehari. Dalam mobilitas yang kian cepat semacam ini, pertemuan dengan orang yang berbeda menjadi sangat lumrah. Orang tidak lagi bisa bersembunyi dari realitas kemajemukan.

Bagi mereka yang bisa menerima dan hidup dalam kemajemukan akan melakukan lompatan fisik dari satu dunia fisik ke dunia fisik lain yang berbeda dengan sangat mudah. Mobilitas fisik mereka ini akan mempengaruhi cara pandang mereka dalam melihat kehidupan yang pada gilirannya akan mempengaruhi empati mereka terhadap kehidupan yang berbeda dan pada akhirnya mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam membangun kehidupan yang beragam dengan penuh pengharapan.

Namun bagi mereka yang menolak keberagaman akan mengambil langkah-langkah isolasi. Mereka yang memaksa untuk menolak realitas keberagaman akan terjebak dalam dua kemungkinan dari upaya purifikasi diri dan kelompoknya. Pemurnian diri ini bisa saja mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat yang berbeda seperti suku-suku pedalaman yang masih ada di Indonesia (Suku Boti, Punan Tubu, Topo Uma, Orang Rimba, Orang Badui). Konsekwensi bagi mereka ini yakni tidak menerima berbagai kemajuan dan hidup berdasarkan cara hidup tradisional yang mereka miliki. Pemurnian lain adalah dengan tetap hidup bersama dalam keberagaman namun anti dengan orang yang berbeda dengannya. Kelompok ini bisa bertindak brutal bila titik perbedaan ini tidak bisa lagi mereka terima/tolerir atau mereka anggap sudah sangat keterlaluan berdasarkan standar yang mereka pegang. Kelompok ini terwakilkan oleh kaum teroris.

Dunia yang makin global dengan segala kemungkinan pluralitas ini memaksa orang untuk berpikir bagaimana menghasilkan manusia yang bisa hidup dengan realitas kemajemukan. Cara utama untuk mendidik manusia agar menerima keberagaman yakni dimulai sejak awal seorang anak dilahirkan di dunia (Liliweri, 2009). Keluarga menjadi tempat pertama, utama dan terutama bagi pendidikan anak untuk mengenal berbagai manusia dengan cara hidupnya yang berbeda. Keluarga memiliki peran besar memberikan pijakan dasar bagaimana seseorang bisa mengerti, memahami, menerima dan hidup dengan orang yang berbeda dari dirinya. Tanpa pendidikan keluarga yang terarah pada pemahaman akan perbedaan, seorang anak akan bertumbuh dengan pemahaman yang keliru akan kemajemukan atau malah menjadi pribadi intoleran.

Tempat kedua yang sangat penting untuk memperkenalkan realitas hidup yang majemuk adalah sekolah. Sekolah seyogyanya mengembang kurikulum dan pola hidup yang menghormati keberagaman. Kurikulum sekolah baik di tingkat SD – PT harusnya tidak membuat mata pelajaran/mata kuliah Pendidikan Agama seperti saat ini dengan memasukan anak-anak pada agama yang dianut. Mata pelajaran/mata kuliah Pendidikan Agama sebaiknya bermuatan perbandingan agama. Dalam mata pelajaran Pendidikan Agama, semua agama diajarkan secara bertahap kedalaman dan

keluasannya sesuai tingkatan pendidikan siswa sehingga semua siswa atau mahasiswa mengetahui semua ajaran, nilai, ritual dan perayaan semua agama. Dengan cara semacam ini akan memunculkan pemahaman menyeluruh oleh semua siswa tentang semua agama yang ada di Indonesia. Dengan pemahaman yang baik semacam ini, diharapkan tidak terjadi prasangka buruk terhadap keyakinan orang lain. Dengan cara ini juga kehidupan bersama dengan kemajemukan beragama dapat tercapai karena seorang anak tahu secara jelas semua ajaran agama.

Realitas kurikulum di sekolah-sekolah Indonesia saat ini memaksa seorang anak bersifat eksklusif dengan agamanya saja dan melihat agama orang lain secara sepintas. Hal ini tergambar dalam buku-buku pelajaran Pendidikan Agama siswa yang salah memaparkan ajaran agama lain kepada peserta didik yang berakibat sejak belia anak-anak sudah salah memahami agama orang lain. Ada banyak bukti di mana buku pelajaran agama berisi informasi yang salah tentang agama lain (Batlolone, 2022). Implikasi ke depan bagi bangsa Indonesia dengan pola kurikulum semacam ini berbahaya sebab akan menimbulkan kesalahpahaman dan prasangka buruk akan agama lain. Ini dapat memicu konflik terbuka di kemudian hari.

Realitas lain yang bermasalah dalam sistem pendidikan di Indonesia yang menghalangi pemahaman hidup yang toleran dengan keberagaman adalah fenomena pemaksaan jilbab di sekolah oleh aturan yang dikeluarkan sekolah (Ardanareswari, 2021). Penyeragaman perbedaan agama dalam satu aturan yang dikeluarkan oleh sekolah selain membuat diskriminasi bagi kelompok minoritas namun ke depan akan membentuk polarisasi pemikiran dan stigma buruk dari kaum minoritas kepada kaum mayoritas dan sebaliknya dari kaum mayoritas merasa diri superior dari kaum mayoritas. Hal ini sangat tidak baik bagi kehidupan berbangsa di kemudian hari.

Fakta lain yang mengejutkan yang ditemukan di sekolah di Indonesia yakni guru melarang siswa minoritas untuk belajar agama atau melakukan aktivitas keagamaan dalam kerangka pelajaran agama di ruang-ruang sekolah (Tim, 2022). Pola pendidikan yang diskriminasi terhadap anak yang berbeda agama semacam ini adalah modal dasar bagi intoleransi di kemudian hari. Sekolah sebagai sebuah wadah pendidikan seyogyanya terbuka bagi semua yang berbeda malah memberikan

pedoman yang bertolak belakang dari realitas kemajemukan. Guru yang menjadi teladan sebaliknya memberikan contoh diskriminasi rasial bagi anak. Apa yang diperlihatkan oleh sekolah dan guru akan tertanam dalam benak siswa yang kemudian hari dapat saja reproduksi kembali nilai dan perilaku seperti yang ia terima. Jika anak memiliki kemampuan kritis, di kemudian hari mungkin tidak akan lakukan perilaku diskriminatif tersebut namun tidak ada jaminan hal tersebut terjadi.

Selain itu, ada berbagai contoh peraturan daerah yang diskriminatif kepada kelompok minoritas agama yang berbeda di Indonesia (Faqih, 2018). Perda berbasis agama, baik perda berdasarkan ajaran Islam maupun Kristen dan lainnya yang bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum oleh semua warga negara. Umat agama yang berbeda semestinya tidak mengikuti aturan semacam ini - hal ini menimbulkan diskriminasi hukum. Jika mengikutinya akan terjebak dalam pemaksaan hukum yang tidak ia yakini. Sangat dilematis namun ini ada di Indonesia saat ini. Mereka yang paling dikorbankan adalah anak-anak dan kaum muda yang dikemudian hari akan menjadi pemimpin bangsa. Model pendidikan dan politik identitas semacam ini seharusnya ditinggalkan agar kehidupan berbangsa di kemudian hari menjadi lebih baik.

Dalam konteks Kota Kupang sejauh ini belum terdengar terjadi diskriminasi dan pemaksaan agama dalam dunia pendidikan. Harapannya, hal ini tetap terpelihara dengan berbagai modal sosial dan budaya yang dimiliki masyarakat Kota Kupang dan NTT. Namun dalam konteks nasional, situasi kemajemukan sedang tidak baik-baik saja sebab sistem pendidikan di rumah, sekolah, pemerintahan dan yang sedang mengemuka, politik identitas sangat kentara dipertontonkan di muka umum melalui berbagai media dan media sosial. Jika hal ini tidak dihentikan, kedepan ke-Indonesiaan bisa retak dan anak-anak bangsa bisa masuk dalam konflik sektarian yang berkepanjangan dan meluluhlantakan negara bangsa ini.

Referensi

Adhi, I. L. B. (2018). Di Balik Kontroversi Indeks Kota Toleran dari SETARA Institute.

- Tirto.Id*, Politik. <https://tirto.id/di-balik-kontroversi-indeks-kota-toleran-dari-setara-institute-dbvq>
- Ardanaeswari, I. (2021). Pemaksaan Memakai Jilbab Saat Ini dan Pelarangan pada Era Orde Baru. *Tirto.Id*, Sosial Budaya. <https://tirto.id/pemaksaan-memakai-jilbab-saat-ini-dan-pelarangan-pada-era-orde-baru-f9Kb>
- Aziz, A. (2019). Pendayagunaan Kearifan Lokal untuk Kerukunan Umat Beragama: Pelajaran dari Nusa Tenggara Timur. In Kustini (Ed.), *Monografi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Monograf). Litbangdiklat Press. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/upload/files/MONOGRAFI%283%29.pdf>
- Batlolone, V. (2022). PGI Surati Mendikbudristek, Protes soal Buku Pelajaran SMP yang Keliru tentang Iman Kristen. *Kompas.Tv*, Nasional. <https://www.kompas.tv/article/313041/pgi-surati-mendikbudristek-protes-soal-buku-pelajaran-smp-yang-keliru-tentang-iman-kristen?page=all>
- BPS. (2021). *Persentase Penduduk Miskin September 2021 turun menjadi 9,71 persen*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html>
- Chyntia. (2021). *10 Kota dengan Toleransi Tertinggi 2020*. Indonesiabaik.Id. <https://indonesiabaik.id/infografis/10-kota-dengan-toleransi-tertinggi-2020>
- Faqih, F. (2018). Perda Berbasis Agama Dinilai Rentan Diskriminasi. *Merdeka.Com*, News. <https://www.merdeka.com/peristiwa/perda-berbasis-agama-dinilai-rentan-diskriminasi.html>
- Liliwari, A. (2009). *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural* (2nd ed.). LKIS.
- LOCALISE SDGs in Indonesia. (2018). *Profil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur*. LOCALISE SDGs in Indonesia. <https://localisedsgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/17>
- Made, I. G., & Sena, W. (2020). Peran Umat Hindu Dan Kristen Di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Multikultural Dan Multireligius*, 19(1), 100–114.
- Permana, R. H. (2022). Singkawang Jadi Kota Paling Toleran versi Setara, Depok Terbawah. *Detiknews*, Berita. <https://news.detik.com/berita/d-6008606/singkawang-jadi-kota-paling-toleran-versi-setara-depok-terbawah>
- Riana, F. (2021). Laporan Indeks Kota Toleran 2020 Versi Setara: Salatiga Ranking Pertama. *Tempo.Co*, Nasional. <https://nasional.tempo.co/read/1436478/laporan-indeks-kota-toleran-2020-versi-setara-salatiga-ranking-pertama>
- S-20/BP/S-12/A-6/N-1. (1998). KELOMPOK ANARKIS DAN NIHILIS RACUN SANGAT BERBAHAYA.pdf. *Suara Karya*.
- Sodli, A. (2009). *P ENELITIAN K ERUKUNAN U MAT B ERAGAMA DI P ROVINSI N USA T ENGGARA T IMUR (NTT)*. XVI(01), 64–73.
- Taopan, N. F., Ly, P., & Lobo, L. (2020). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Kupang. *Pendidikan Pancasila an Kewarganegaraan*, 1(1), 1–9. Peran, Forum Kerukunan Umat Beragama, Toleransi Beragama
- Tim. (2022). SMAN 2 Depok Diduga Larang Siswa Rohani Kristen. *Peduli Bangsa*, News. <https://pedulibangsa.co.id/sman-2-depok-diduga-larang-siswa-rohani-kristen/>

SEBUAH TANGGAPAN

ATAS MULTIKULTURALISME DALAM PRAKTIK POLITIK DI INDONESIA

1) Apa yang anda tangkap dalam pesan tulisan yang bersifat analisis hal politis?

Dalam politik tidak ada teman atau musuh abadi. Kepentingan adalah teman abadi bagi semua aktor dan partai politik. Hari ini aktor A bisa berdamai dan bersahabat dengan aktor B dan berhadap-hadapan muka dengan aktor C sedangkan aktor D tidak disentuhnya. Namun di lain waktu ketika kepentingan aktor A berseberangan aktor B tapi sama dengan aktor C, Si A akan meninggalkan si B, memeluk si C dapat pula menikam si D karena menghalangi jalannya.

Hal ini terlihat dalam dinamika politik yang dipertontonkan oleh para aktor dan partai politik saat ini di Senayan. Meskipun pemilihan presiden-wakil presiden dan legislatif masih dua tahun namun akrobat politik sudah dipertontonkan oleh aktor dan partai politik. Koalisi partai politik tahun 2019 guna mendukung pemerintahan presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma'ruf Amin seharusnya berjalan hingga 2024 tanpa ada goncangan kepentingan namun hal tersebut, jauh panggang dari api. Koalisi ini mulai goyang ketika tahun koalisi baru berjalan tiga tahun. Setiap partai sudah menentukan koalisi baru untuk tahun 2024 namun masih bertahan dalam perahu koalisi 2019.

Sepatutnya, drama politik semacam ini tidak perlu dipertontonkan secara jelas kepada publik. Tiap aktor dan partai politik memang perlu mempersiapkan amunisi dan strategi menjelang perhelatan politik lima tahunan pada tahun 2024 namun seyogyanya gerakan-gerakan tersebut tidak terlalu kasar dan keras karena masih cukup waktu. Lebih elok jika partai-partai berkuasa ini menunjukkan kualitas kerja mereka di berbagai bidang yang dipercayakan kepada mereka sehingga kualitas pelayanan mereka itulah yang akhirnya menjadi jualan utama mereka di tahun 2024. Namun yang kelihatan sekarang dalam diskursus publik yang muncul malah pertikaian antaraktor dan parpol dalam koalisi karena setiap partai politik dengan berani telah menentukan patner koalisi berikutnya di tahun 2024.

Dan yang tidak elok lainnya adalah diskursus ini akhirnya mengotori ruang-ruang publik yang harusnya diisi oleh wacana implementasi berbagai kebijakan pembangunan bangsa, wacana pembangunan di berbagai bidang, diskusi-diskusi pembangunan berkeadilan dan perjuangan hak asasi dan implementasi teknologi dalam masyarakat dan pemerpihakan kepada berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa terutama masyarakat bawah.

Masyarakat memahami bahwa aktor dan partai politik membutuhkan amunisi dan strategi untuk tahun 2024 namun gerakan mempersiapkan hal-hal tersebut harusnya dijalankan secara santun dan halus agar tidak membuat goncangan berarti yang pada akhirnya membuat perpecahan pada masyarakat bawah. Akibat gerakan politik yang dilakukan oleh aktor dan partai politik, segregasi politik yang sudah terjadi sejak pilkada Jakarta 2016 lalu kembali terkuak lebar. Masyarakat bawah terbelah menjadi kadrin dan cebong hingga kini, malah cenderung dipertahankan dan dimanfaatkan.

Dalam drama ini juga memperlihatkan garis demarkasi tiap partai politik bukanlah ideologi partai melainkan kepentingan. Seyogyanya partai yang berkoalisi adalah mereka yang searah seirama dalam hal ideologi – dalam arti partai nasional lebih cocok bila berkoalisi dengan partai nasionalis, partai kanan – keagamaan berkoalisi dengan partai serupa, partai kiri berkoalisi dengan partai kiri. Dengan model semacam ini semua kebijakan yang diambil oleh partai koalisi tidak memiliki halangan berarti dalam internal partai koalisi. Partai-partai yang berkoalisi ketika berkuasa tidak terlalu menghadapi tarik ulur penetapan kebijakan karena arah ideologi mereka mirip sehingga substansi kebijakan tidak terlalu dipermasalahkan mungkin teknis implementasinya yang perlu upaya penyesuaian.

Namun situasi di Indonesia dan saat ini dan ke depan tidak demikian adanya. Ideologi bukanlah pertimbangan utama dalam pemilihan dan keputusan sebuah koalisi oleh partai politik. Pertimbangan utama partai-partai dalam sebuah koalisi yakni kemungkinan terdekat kekuasaan dapat diraih atau tidak dengan koalisi yang dibangun bersama. Efeknya ketika partai-partai berbeda ideologi berhasil meraih kekuasaan yang menjadi persoalan adalah pembagian jatah kekuasaan dan gentok-gentokan dalam penentuan kebijakan dan tarik ulur implementasi kebijakan. Misalnya,

partai nasionalis ingin sebuah kebijakan yang lebih terbuka namun dihalangi atau ditantang oleh anggota koalisinya sendiri yang dari sayap kanan.

2) Bagaimana perilaku oknum politisi dalam bingkai multikultural di Indonesia dan praktiknya demi diri, kelompok, dan bangsa Indonesia.

Dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang multikultural ini, seharusnya aktor dan partai politik bersepakat bahwa apapun arah ideologi dan kebijakan partai politiknya, tujuan bernegara hanya satu yakni meminjam istilah Bertrand Russell, memajukan kerja sama sosial di antara umat manusia dengan menjalankan kebijaksanaan agar kebahagiaan bersama, kedamaian lahir batin dan saling pengertian di dunia dapat tercapai. Atau dalam ideologi negara kita terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bingkai persatuan dan kesatuan yang majemuk.

Bila ini yang ingin dicapai oleh semua aktor dan partai politik maka tujuan berpolitik semua komponen bangsa bukan untuk mengubah landasan dasar negara dengan empat pilarnya dengan dasar yang lain. Juga proses mendapatkan kekuasaan politik tidak bisa dengan menghancurkan keanekaragaman ke-Indonesiaan yang sudah ada sejak awal bangsa ini ada. Dengan kata lain, politik identitas harus dihilangkan dalam kazanah perpolitikan anak bangsa.

Arah dan gerak untuk merebut, mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh semua anak bangsa apapun latar belakang politiknya yakni mamajukan kehidupan bangsa di semua aspek hidup agar nama Indonesia dikenal di seluruh dunia dan kualitas hidup bangsa baik lahiriah maupun batiniah tercukupi secara berlimpahan dalam bingkai dan tegaknya NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. Itu juga berarti politik identitas menjadi frase haram apalagi dipraktekan dalam kazanah perpolitikan di Indonesia.

Dengan demikian etika politik tiap anak bangsa harus berpegang pada tiga hal berikut: (1) Mereka yang ingin berkuasa di Indonesia bukan menjadikan kekuasaan sebagai sebuah tujuan namun perebutan kekuasaan dilakukan untuk tujuan tertentu yang lebih berarti. (2) Tujuan kekuasaan yang diperebutkan oleh aktor atau partai politik harusnya tidak hanya memuaskan aktor dan partai politik itu sendiri tetapi juga

membantu memuaskan tujuan lebih banyak orang lintas partai dan golongan. (3) Untuk mendapatkan kekuasaan tidak boleh menghalalkan cara atau menghancurkan kestabilan dan keanekaragaman hidup berbangsa dan bernegara.

3) Bagaimana proyeksinya ke masa depan bagi bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia terus berproses. Ada begitu banyak kepentingan dan kekuatan yang saat ini sedang bersaing di untuk mendapatkan kekuasaan. (1) Ada kaum nasionalis yang ingin Indonesia tetap tegak dengan demokrasi sebagai jalannya. (2) Ada kaum kanan yang cenderung bergerak ke tengah yang masih menerima perbedaan dan hidup dalam perbedaan tanpa merasa perbedaan sebagai ancaman. Kelompok ini masih menerima demokrasi sebagai jalannya.

(3) Namun ada kelompok ekstrim kanan yang berupaya untuk mengubah dasar negara. Mereka memanfaatkan demokrasi untuk mencapai tujuan mereka yakni mengubah landasan bernegara. (4) Ada yang mengemukakan bahwa kelompok kiri bangkit lagi namun tuduhan ini berlebihan – Hal ini semacam sentiment politik kelompok tertentu untuk menjungkal kekuatan nasionalis yang masih berkuasa dan punya kekuatan menjelang tahun 2024. (5) Di sisi lain ada kekuatan pengusaha dan pemodal yang kadangkala tidak memperhitungkan ideologi atau bentuk dan model negara. Yang dipentingkan usaha tetap berjalan dan keuntungan tetap didapatkan. Mereka bisa bisa bergerak ke mana saja. Dengan modal yang kuat mereka bisa menyetir semua partai politik.

(6) Kita juga tidak bisa menafikan kelompok lintas negara yang memiliki kepentingan besar di Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya alam yang luar biasa. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Ini merupakan pasar yang sangat bagus untuk semua jenis komoditas baik itu yang positif maupun negatif seperti obat-obatan terlarang, perjudian, perdagangan manusia maupun pornografi. Kekuatan lintas negara ini sangat berbahaya jika tidak diprediksi dan diambil kebijakan yang memadai untuk menanggulangi ancaman-ancamannya.

(7) Di sisi lain, ada kekuatan lain yang dulu disepelekan namun saat ini menjadi yang terbesar di Indonesia yakni masyarakat itu sendiri. Komponen terakhir ini dulu

dianggap tidak memiliki kekuatan berarti namun dengan kemajuan teknologi terutama internet dan media sosialnya, kelompok masyarakat bawah ini memiliki kekuatan yang luar biasa berpengaruh dalam mempengaruhi kebijakan dan opini publik. Persoalannya dalam kelompok ini tidak semua paham politik, kritis dan terliterasi tentang media digital dan pesannya. Kelompok ini membutuhkan pendidikan politik dan literasi digital agar cerdas dan kritis dalam menanggapi semua fenomena sosial di internet dan media sosial.

Saya percaya medan perang antarkelompok di atas saat ini dan ke depan ada di ruang maya melalui internet dan media sosial. Akan ada banyak *hoax* bertebaran. Akan ada banyak propaganda yang berseliwerang. Semua kubu akan memainkan strategi dan triknya untuk memenangkan isu dan simpati masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergisitas semua kelompok masyarakat agar bersepakat untuk mengisi ruang-ruang maya dengan pesan-pesan positif. Namun menurut saya hal ini tidak akan mungkin dengan semua nafsu kuasa yang dipertontonkan saat ini oleh aktor dan partai politik. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah kerja sama semua komponen bangsa yang peduli dengan kemajuan dan kedamaian negara agar bahu membahu melakukan pendidikan politik dan literasi media digital bagi semua kelompok anak bangsa.

Semua yang berkehendak baik di negara ini memiliki kewajiban untuk memenuhi ruang-ruang publik dan ruang maya kita dengan informasi-informasi yang benar dan positif. Informasi *hoax* hanya bisa dilawan dengan informasi yang benar dan baik. Propaganda hitam harus dilawan dengan propaganda putih. Diskusus dilawan dengan diskursus.

Dengan cara demikian, masyarakat akan semakin cerdas. Kecerdasan dan kekritisannya masyarakat dalam menyingkapi berbagai fenomena sosial politik memberi arah baik dan baru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya yakin Indonesia akan menjadi lebih baik ke depan.

4) Sesungguhnya mereka itu sibuk memikirkan siapa menurut anda?

Ketika aktor dan partai politik berpolitik dengan menghalalkan segala cara tanpa memperhitungkan konsekwensi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang

majemuk, sebenarnya kelompok-kelompok ini sedang memperjuangkan kekuasaan untuk kekuasaan atau kekuasaan untuk perut diri sendiri dan kelompoknya.

Menurut saya dalam sistem demokrasi perlu disiapkan sistem untuk menghalangi aktor atau kelompok atau partai politik model ini untuk berkuasa. Namun hal ini sulit dilakukan dalam sistem demokrasi yang memberi semua perbedaan pandangan tumbuh. Oleh karena itu, palang pintu terakhir untuk membatasi ruang gerak kelompok ini dikembalikan kepada masyarakat.

Masyarakat di sini ada dua kelompok. *Pertama*, yang mahir dan menguasai dinamika politik. Mereka ini adalah kaum politisi, cendekiawan, rohaniwan, LSM dan kelompok masyarakat lain yang paham dinamika sosial politik. Mereka perlu memanfaatkan berbagai kemampuan, usaha, kecerdasan, relasi, peluang, pendidikan dan sumberdaya lainnya untuk membuat wacana tandingan untuk melawan kelompok-kelompok berpikiran sempit. Perang wacana dan pendidikan politik harus diusahakan oleh kelompok terpelajar ini bagi kelompok kedua yang lebih besar namun terbatas dalam memahami dinamika dan konteks politik.

Kelompok *kedua*, adalah kelompok pemilih yakni masyarakat biasa/bawah. Kelompok ini memiliki dua kekuatan yakni melawan kelompok pemecah belah ini dengan menyebarkan informasi-informasi positif dan baik yang sudah dikembangkan oleh kelompok pertama ke berbagai lini. Kedua, menggunakan hak pilih mereka dengan tidak memilih para aktor atau partai politik yang menggunakan cara-cara kasar dan memecah belah untuk meraih kekuasaan.